



Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia

The Effect of Urbanization on Poverty Reduction in Indonesia

Zara Hadijah¹

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mohammad Isnaini Sadali

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Artikel Masuk : 6 Juli 2020

Artikel Diterima : 25 November 2020

Tersedia Online : 31 Desember 2020

Abstrak: Urbanisasi dan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi di Indonesia belum mampu menyejahterakan para pelakunya maupun daerah yang menjadi tujuan urbanisasi. Setiap 1% pertumbuhan urbanisasi di Indonesia hanya mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4%. Rendahnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari fenomena urbanisasi di Indonesia pada akhirnya hanya mengubah penduduk miskin desa menjadi miskin kota. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, baik secara agregat wilayah maupun pada tingkat perdesaan dan perkotaan sebagai daerah asal dan daerah tujuan urbanisasi. Studi ini menggunakan data sekunder kependudukan dan kemiskinan hasil pengukuran Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Analisis data dilakukan dengan teknik regionalisasi wilayah, Indeks Primasi, Kurva Lorenz, Sistem Informasi Geografis (SIG), dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi memiliki hubungan positif terhadap pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin perkotaan, sebaliknya tingkat urbanisasi memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin perdesaan. Setiap terjadi pertambahan variabel persentase penduduk perkotaan sebesar satu unit, maka rata-rata variabel PDB/kapita akan bertambah 0,466, kemudian diikuti pula dengan pertambahan rata-rata variabel jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 0,447 dan pengurangan rata-rata variabel jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 0,705.

Kata Kunci: kemiskinan; pembangunan berkelanjutan; regresi linear; urbanisasi

Abstract: *Urbanization and poverty are two important aspects closely linked to sustainable development goals. Urbanization in Indonesia is still far from improving migrant welfare as well as their destination regions. Every 1% growth of urbanization in Indonesia can only increase 4% of GDP per capita. Low economic benefits resulted from urbanization in Indonesia merely shift rural poor to become urban poor. The purpose of this study was to analyze the effect of urbanization on poverty reduction in Indonesia, both in the regional*

¹ Korespondensi Penulis: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Email: zara4350@gmail.com

aggregate and at the rural and urban levels as the origin and destination regions of urbanization. This study used secondary data of population and poverty from Population Census (SP), the Inter-Census Population Survey (SUPAS), and the National Socio-Economic Survey (SUSENAS). Data analysis was performed using regionalization techniques, Primacy Index, Lorenz Curve, Geographic Information System (GIS), and simple linear regression. The results showed that the rate of urbanization had a positive relationship with per capita income and the population of urban poor, but had a negative relationship with the population of rural poor. A unit increase in urban population variable percentage would increase the average GDP/capita variable by 0,466. This would be followed by an increase in the average urban poor population variable by 0,447 and a reduction in the average rural poor population variable by 0,705.

Keywords: *linear regression; poverty; sustainable development; urbanization*

Pendahuluan

Urbanisasi dan penurunan kemiskinan merupakan dua aspek penting yang berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Urbanisasi merupakan proses pembangunan yang melibatkan berbagai faktor multidimensional baik demografi, sosial, ekonomi, hingga geografis wilayah dan fenomenanya ditandai dengan kejadian pemusatan penduduk pada kawasan perkotaan, kemudian diikuti dengan modernisasi aspek-aspek kehidupan lainnya sebagai akibat dari pengkotaan (Liu et al., 2014). Umumnya, fenomena urbanisasi terjadi lebih intensif di negara-negara berkembang salah satunya seperti Indonesia (Chauvin et al., 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (1997, 2007, 2015), Indonesia terus mengalami peningkatan proporsi penduduk perkotaan dari 30,9% di tahun 1990 menuju 43,1% di tahun 2005 serta meningkat tajam menjadi 53,12% di tahun 2015. UN Habitat (2016) menyatakan bahwa di Indonesia, 65% pertumbuhan penduduk perkotaan lebih disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi sedangkan sekitar 35% disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan.

World Bank (2018) menyatakan bahwa urbanisasi mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Fenomena urbanisasi di China, Thailand, Vietnam, dan India secara signifikan telah berhasil meningkatkan PDB per kapita. Sebagai contoh di India setiap satu persen (1%) pertumbuhan urbanisasi mampu meningkatkan nilai PDB per kapita hingga tiga belas persen (13%). Berbeda dengan Indonesia, satu persen (1%) pertumbuhan urbanisasi hanya mampu meningkatkan nilai PDB per kapita hingga empat persen (4%) (World Bank, 2018). Rendahnya pengaruh urbanisasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia mengindikasikan bahwa urbanisasi belum signifikan dalam menyejahterakan pelakunya hingga mampu keluar dari kemiskinan (Chen et al., 2019).

Studi empiris tentang hubungan konsep urbanisasi yang dilihat dari persentase penduduk perkotaan dengan konsep kemiskinan yang dilihat dari pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi dua sisi argumen (Acosta et al., 2007; Solarin, 2017). Pertama, pembuktian hubungan urbanisasi dan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bivariat tanpa mempertimbangkan penggabungan variabel-variabel lain. Kedua, pembuktian hubungan urbanisasi dan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan multivariat yang melibatkan variabel-variabel lain seperti pembangunan ekonomi. Henderson (2003) menunjukkan adanya hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita untuk sampel 28 negara yang mewakili negara maju maupun negara berkembang. Fosu (2017), Hassan & Pitoyo (2017), Chen et al. (2019), dan Jayanthakumaran et al. (2020) menggunakan variabel persentase penduduk perkotaan untuk mewakili urbanisasi dan variabel pendapatan per kapita untuk mewakili kemiskinan. Hasilnya membuktikan bahwa persentase penduduk perkotaan yang mewakili tingkat urbanisasi suatu wilayah ternyata

berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Adams & Page (2005), Acosta et al. (2007), dan Youssef et al. (2016) menggunakan variabel jumlah penduduk miskin untuk mewakili kemiskinan. Ternyata urbanisasi mampu menurunkan jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah. Youssef et al. (2016) dan Debski (2018) memerinci bahwa penurunan jumlah penduduk miskin paling signifikan terjadi di perdesaan. Meskipun begitu, terdapat faktor heterogenitas wilayah yang menyebabkan adanya variasi kekuatan pengaruh urbanisasi terhadap kemiskinan. Pada negara-negara maju, urbanisasi mendatangkan lebih banyak manfaat ekonomi dibandingkan pada negara-negara berkembang.

Brühlhart & Sbergami (2009) mengamati bahwa urbanisasi berhubungan positif dengan pendapatan per kapita. Penelitian Brühlhart & Sbergami (2009) mempertimbangkan variabel lainnya seperti jumlah lapangan kerja di sektor industri. Turok & Mc Granahan (2013) melibatkan variabel pertumbuhan ekonomi untuk melihat hubungan urbanisasi dan kemiskinan pada negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Hasilnya, penduduk negara-negara dengan tingkat perekonomian rendah hingga menengah tidak terlalu merasakan manfaat penurunan kemiskinan dari urbanisasi. Ramachandran (2014) menyatakan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Meskipun begitu, menurut Ramachandran (2014) tidak ada hubungan linear yang sederhana antara urbanisasi dan kemiskinan. Terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan seperti besar populasi perkotaan, pengaruh industrialisasi, hingga aspek kebijakan. Dampak urbanisasi berbeda di berbagai negara dan sebagian besar tergantung pada tahap perkembangan ekonomi masing-masing negara (Chauvin et al., 2017). Dengan demikian hasil yang diperoleh mungkin tidak relevan untuk semua negara sampel yang digunakan. Di sisi lain perbedaan teknik analisis dapat menyebabkan hasil yang berbeda pula. Arah hubungan antara urbanisasi (persentase penduduk perkotaan) dan kemiskinan (pendapatan per kapita) pada akhirnya tetap ambigu, terutama pada kasus negara berkembang dengan fenomena urbanisasi yang intensif dan kompleks.

Cobbinah et al. (2015) menyatakan bahwa urbanisasi pada dasarnya mampu mengurangi kemiskinan global secara agregat. Namun ketika dikaji lebih detail dengan meninjau kemiskinan dari variabel jumlah penduduk miskin, belum diketahui pengaruh urbanisasi terhadap jumlah penduduk miskin di perdesaan (*origin region*) maupun di perkotaan (*destination region*). Berbeda dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini berupaya untuk memperdalam lingkup kajian ke arah kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Kajian pengaruh urbanisasi terhadap kemiskinan dengan meninjau jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan masih menjadi topik yang kurang populer di Indonesia. Konsep kemiskinan diturunkan menjadi variabel pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin perkotaan, dan jumlah penduduk miskin perdesaan. Penggunaan ketiga variabel tersebut dilakukan untuk melihat konsistensi dampak urbanisasi terhadap kemiskinan. Ketika urbanisasi mampu meningkatkan pendapatan per kapita, apakah kemudian urbanisasi juga mampu menurunkan jumlah penduduk miskin perkotaan maupun perdesaan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia, baik secara agregat wilayah maupun pada tingkat perdesaan dan perkotaan sebagai daerah asal dan tujuan urbanisasi.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder hasil publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Bentuk data berupa data panel (*pooled data*) yaitu gabungan antara data *time series* selama 18 tahun (tahun 2000-2018) dan data *cross section* 34 provinsi di Indonesia. Dokumen publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan merupakan hasil pengukuran Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Indeks Primasi

Teknik Indeks Primasi juga digunakan oleh Chen et al. (2019) untuk melihat ketimpangan tingkat urbanisasi melalui populasi penduduk perkotaan. Hasil pengukuran Indeks Primasi akan menunjukkan peringkat setiap provinsi dalam konteks urbanisasi. Indeks Primasi memiliki nilai 0 hingga 1. Indikasinya semakin tinggi nilai Indeks Primasi (mendekati 1) maka semakin terpusat distribusi populasi penduduk perkotaan. Hal sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Primasi (mendekati 0) maka semakin merata distribusi populasi penduduk perkotaan. Persamaan matematis Indeks Primasi (1) dalam penelitian ini dapat dilihat pada persamaan (1), sebagai berikut:

$$P_i = \frac{1}{(n-1)c_i} \sum_j^n (i-1)^{(c_i-c_j)} \quad (1)$$

Keterangan: P_i = indeks primasi; C = jumlah penduduk kota; n = jumlah kota dalam sistem kota-kota; i dan j = jenjang kota-kota, kota terbesar sebagai jenjang pertama dan kota terkecil sebagai jenjang n .

Kurva Lorenz

Pengolahan Kurva Lorenz dalam penelitian ini diawali dengan memeringkat setiap provinsi dari nilai terbesar menuju terkecil berdasarkan perbandingan populasi penduduk perkotaan suatu provinsi terhadap total populasi penduduk perkotaan dikalikan 100%. Peringkat populasi penduduk perkotaan kemudian berfungsi sebagai absis (sumbu x) dan persentase kumulatif total populasi penduduk perkotaan berfungsi sebagai ordinat (sumbu y) (Chen et al., 2019). Bentuk kurva cembung ke atas menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi populasi perkotaan. Semakin Kurva Lorenz mendekati garis pemerataan maka derajat ketimpangan distribusi populasi penduduk perkotaan akan semakin kecil dan sebaliknya.

Regionalisasi Wilayah

Terdapat dua hal yang dijadikan dasar regionalisasi dalam penelitian ini yaitu pertama, regionalisasi wilayah berdasarkan tingkat urbanisasi dan tingkat pendapatan per kapita pada tahun terkini. Kedua, regionalisasi wilayah berdasarkan kecepatan laju urbanisasi dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita dalam periode waktu tertentu. Kemudian dilakukan modifikasi Tipologi Klassen untuk menghasilkan sembilan kelompok wilayah yang merupakan persilangan dari tiga tingkatan nilai variabel yaitu rendah, sedang, dan tinggi (Hassan & Pitoyo, 2017). Klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi didasarkan pada acuan nilai variabel urbanisasi dan pendapatan per kapita di tingkat nasional.

Uji Regresi Linear

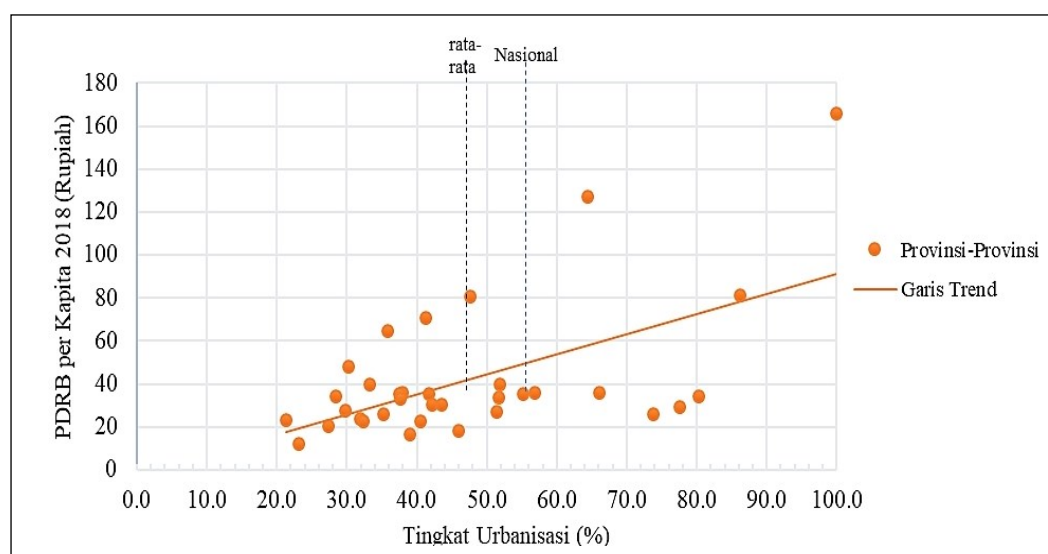
Analisis regresi linear mampu menunjukkan pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan (Chen et al., 2019; Fosu, 2017). Uji regresi linear dalam penelitian ini menggunakan variabel turunan konsep urbanisasi sebagai variabel pengaruh (X) sedangkan variabel turunan konsep kemiskinan sebagai variabel yang dipengaruhi (Y). Pengujian dilakukan terhadap tiga model regresi linear dengan variabel dipengaruhi (Y) yang berbeda yaitu: pendapatan per kapita (Y_1), persentase penduduk miskin perkotaan (Y_2), dan persentase penduduk miskin perdesaan (Y_3). Model regresi tersebut dicari tahu hubungan pengaruhnya pada seri waktu tertentu yaitu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan 2018. Estimasi hubungan pengaruh antara variabel-variabel urbanisasi terhadap variabel-variabel kemiskinan dapat dilihat melalui nilai koefisien regresi. Koefisien b dinamakan sebagai

koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini menunjukkan peningkatan apabila koefisien b bernilai positif dan menunjukkan penurunan apabila koefisien b bernilai negatif.

Hasil dan Pembahasan

Regionalisasi Wilayah Berdasarkan Karakteristik Urbanisasi dan Kemiskinan di Indonesia

Pada tahun 2018, tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai angka 55,84% dengan populasi penduduk perkotaan sebesar 147.800.366 jiwa, yang berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Secara umum garis tren antara variabel tingkat urbanisasi dan PDRB/kapita membentuk hubungan positif yang artinya semakin tinggi tingkat urbanisasi maka semakin tinggi pula PDRB/kapita (Gambar 1). Fenomena ini sejalan dengan studi-studi terdahulu terkait pengaruh urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan yang ditinjau dari pendapatan per kapita (Chen et al., 2019; Fosu, 2017; Hassan & Pitoyo, 2017; Jayanthakumaran et al., 2020). Beberapa provinsi cenderung membentuk pola mengelompok khususnya pada tingkat urbanisasi rentang 30% sampai 50%, di antaranya yaitu Papua Barat (30,17%), Aceh (31,85%), Sulawesi Tenggara (37,61%), Sumatera Selatan (37,94%), Riau (41,26%), dan Sumatera Barat (42,18%). Sementara provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2018 umumnya memiliki tingkat urbanisasi pada rentang 50%-100%.



Gambar 1. Scatter Plot Urbanisasi dan Pendapatan per Kapita di Indonesia Tahun 2018

Karakteristik tingkat urbanisasi dan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan menjadi sembilan kelompok wilayah. Kategori tinggi, sedang, dan rendah ditetapkan dengan mengacu pada tingkat urbanisasi (55,84%) dan PDRB/kapita nasional (41,8 juta/kapita). Kelompok wilayah dengan kategori tingkat urbanisasi dan PDRB/kapita sebagai berikut tinggi-tinggi, tinggi-sedang, sedang-tinggi dianggap merepresentasikan wilayah dengan proses urbanisasi intensif dan pembangunan ekonominya relatif maju. Kelompok wilayah dengan kategori tingkat urbanisasi dan PDRB/kapita sebagai berikut rendah-tinggi, sedang-sedang, dan tinggi-rendah dianggap merepresentasikan wilayah yang

sedang berkembang. Proses urbanisasinya belum begitu intensif, namun mengalami peningkatan diikuti dengan peningkatan nilai PDRB/kapita. Kelompok wilayah dengan kategori tingkat urbanisasi dan PDRB/kapita sebagai berikut rendah-sedang, sedang-rendah, dan rendah-rendah dianggap merepresentasikan wilayah dengan proses urbanisasi yang lambat dan pembangunan ekonominya relatif tertinggal (Tabel 1).

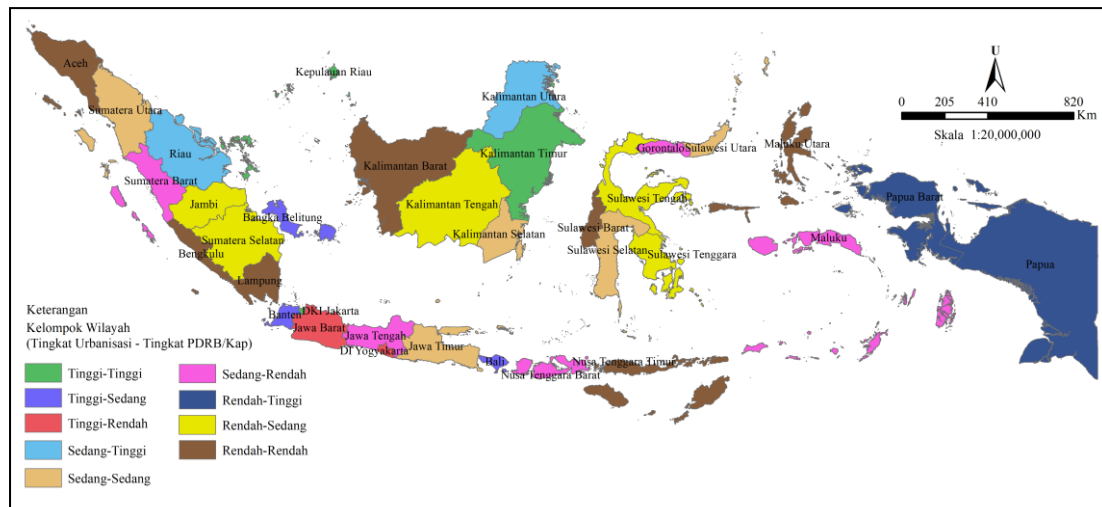
Pembagian tiga kelompok besar wilayah di Indonesia yang merepresentasikan wilayah maju, kurang maju, dan tertinggal menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tergabung ke dalam kelompok wilayah tertinggal dibandingkan wilayah maju. Secara rinci terdapat 8 provinsi merepresentasikan wilayah maju, 9 provinsi wilayah kurang maju, dan 17 provinsi wilayah tertinggal. Faktanya, apabila hanya terdapat delapan provinsi yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan PDRB/kapita tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pemusatan sumber daya manusia dan modal kapital pada sebagian kecil wilayah Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan & Pitoyo (2017) serta Jayanthakumaran et al. (2020). Ketimpangan pembangunan yang telah terbentuk sejak masa kolonial dinilai menjadi penyebab pembangunan yang bias ke arah barat Indonesia. Provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mengalami proses urbanisasi yang lebih intensif dibandingkan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga pembangunan ekonominya lebih berkembang dan tingkat kemiskinannya lebih rendah.

Tabel 1. Regionalisasi Wilayah Tingkat Urbanisasi dan PDRB per Kapita Tahun 2018

Tingkat Urbanisasi	PDRB per Kapita		
	Tinggi	Sedang	Rendah
	>41,8 juta	30,6-41,8 juta	<30,6 juta
Tinggi >55,84%	Kepulauan Riau DKI Jakarta Kalimantan Timur	Bangka Belitung Banten Bali	Jawa Barat D.I. Yogyakarta
Sedang 39,02-55,84%	Riau Kalimantan Utara	Sumatera Utara Jawa Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan	Sumatera Barat Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Gorontalo Maluku
Rendah <39,02%	Papua Barat Papua	Jambi Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara	Aceh Bengkulu Lampung Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Sulawesi Barat Maluku Utara

Gambar 2 menunjukkan pola urbanisasi di Indonesia yang cenderung menyebar dan tidak hanya terkonsentrasi di provinsi dengan kota-kota besar. Faktor utama yang melatarbelakangi terbentuknya pola urbanisasi ini adalah konfigurasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan *barrier* alami yang membatasi mobilitas orang maupun barang. Pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa akan lebih tinggi serta dapat meminimalisasi proses primasi berlebihan pada wilayah tertentu. Secara spasial, KBI memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dari KTI. Kemudian proses urbanisasi intensif dapat diamati pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki tingkat urbanisasi lebih dari 50%. Kebijakan pembangunan masa lalu yang terlalu bias ke Pulau Jawa telah membentuk pola urbanisasi yang timpang di masa sekarang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Asumsinya,

penduduk akan melakukan migrasi menuju wilayah yang lebih maju untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.



Gambar 2. Peta Regionalisasi Wilayah Tingkat Urbanisasi dan PDRB per Kapita Tahun 2018

Jayanthakumaran et al. (2020) mengemukakan hal yang berbeda dari persepsi migrasi yang pada umumnya mengacu pada perpindahan desa-kota. Fenomena migrasi internal di Indonesia lebih didominasi oleh migran asal perkotaan dan umumnya migran berpindah ke daerah yang sama, seperti perkotaan ke perkotaan dan perdesaan ke perdesaan dalam suatu kabupaten/kota. Sebaliknya, migrasi dari perdesaan ke perkotaan sebenarnya adalah yang paling jarang terjadi. Selain itu, fenomena migrasi internal di Indonesia juga lebih banyak terjadi pada tingkat individu dibandingkan tingkat keluarga. Penelitian Jayanthakumaran et al. (2020) menjelaskan lebih lanjut terkait efek penurunan kemiskinan yang ditimbulkan oleh migrasi penduduk di Indonesia. Pertama, efek penurunan kemiskinan lebih tinggi terjadi pada migran yang bergerak di dalam kabupaten atau kota tertentu, dengan kata lain menunjukkan bahwa semakin dekat jarak perpindahan akan semakin tinggi efek penurunan kemiskinan. Hal ini tampaknya sesuai dengan prediksi teoretis yang menyatakan bahwa semakin jauh jarak perpindahan, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan semakin besar hambatan untuk bermigrasi. Migrasi ke daerah yang jauh juga umumnya mengindikasikan perbedaan budaya dan lingkungan yang cukup signifikan dibanding daerah asal. Dampaknya migran perlu usaha lebih untuk melakukan adaptasi baik secara sosial maupun ekonomi. Kedua, efek penurunan kemiskinan pada kasus migrasi individu bekerja lebih baik dibandingkan kasus migrasi keluarga. Migrasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga nampaknya lebih banyak mengalami hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Ketiga, migran yang berpindah dari perkotaan ke perkotaan mengalami efek penurunan kemiskinan lebih tinggi dibandingkan migran yang berpindah dari perdesaan ke perkotaan. Migran dari perdesaan pada umumnya akan memiliki lebih banyak hambatan seperti tingkat pendidikan yang rendah, modal migrasi yang minim, serta perbedaan budaya antara kehidupan perdesaan dan perkotaan.

Regionalisasi wilayah Indonesia dengan melihat laju urbanisasi dan laju PDRB/kapita pada rentang tahun 2015 hingga 2020 dapat menunjukkan perkembangan daerah dari tahun ke tahun (Tabel 2). Kategori tinggi, sedang, dan rendah ditetapkan dengan mengacu pada laju urbanisasi (2,73%) dan laju PDRB/kapita nasional (6,34%). Kelompok wilayah

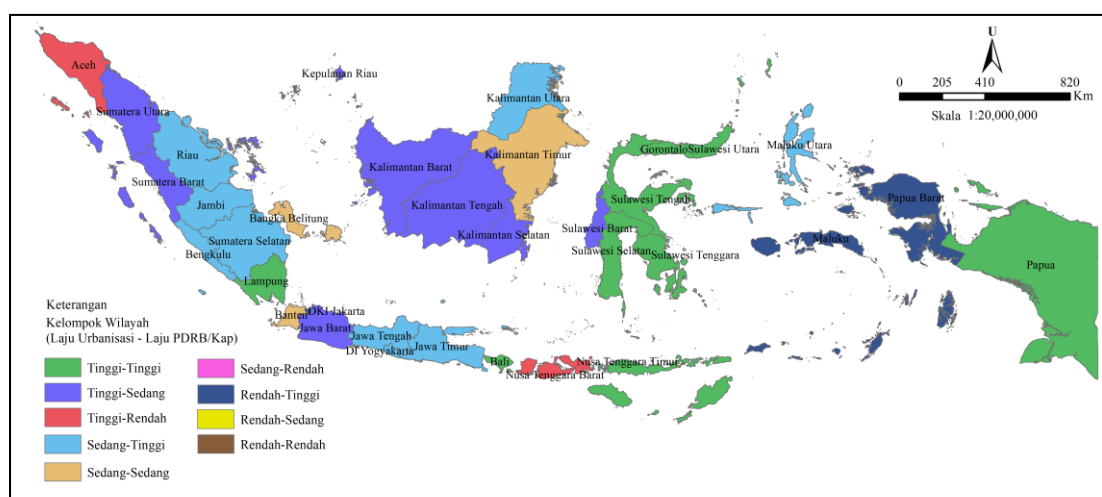
dengan kategori laju urbanisasi dan laju PDRB/kapita sebagai berikut tinggi-tinggi, tinggi-sedang, dan sedang-tinggi dianggap merepresentasikan wilayah yang cepat tumbuh. Peningkatan urbanisasi terjadi secara cepat diikuti dengan pertumbuhan PDRB/kapita. Kelompok wilayah dengan kategori laju urbanisasi dan laju PDRB/kapita sebagai berikut rendah-tinggi, sedang-sedang, dan tinggi-rendah dianggap merepresentasikan: a) wilayah yang perekonomiannya maju tapi tertekan dan b) wilayah yang berkembang cepat meskipun pendapatan/kapitanya relatif rendah.

Tabel 2. Regionalisasi Wilayah Laju Urbanisasi dan Laju PDRB per Kapita Tahun 2018

Laju Urbanisasi	Laju PDRB per Kapita		
	Tinggi >6,34%	Sedang 5,51-6,34%	Rendah <5,51%
Tinggi >2,73%	Lampung	Sumatera Utara	Aceh
	Bali	Sumatera Barat	Nusa Tenggara Barat
	Nusa Tenggara Timur	Kepulauan Riau	
	Sulawesi Utara	Jawa Barat	
	Sulawesi Tengah	Kalimantan Barat	
	Sulawesi Selatan	Kalimantan Tengah	
	Sulawesi Tenggara	Kalimantan Selatan	
	Gorontalo	Sulawesi Barat	
	Papua		
	Riau	Bangka Belitung	-
Sedang 0,82-2,73%	Jambi	Banten	
	Sumatera Selatan	Kalimantan Timur	
	Bengkulu		
	Jawa Tengah		
	D.I. Yogyakarta		
	Jawa Timur		
	Maluku Utara		
Rendah <0,82%	DKI Jakarta	-	-
	Maluku		
	Papua Barat		

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki laju urbanisasi dan laju pertumbuhan PDRB/kapita pada kategori sedang hingga tinggi, dan tidak begitu banyak yang berada di kategori rendah. Secara rinci terdapat 25 provinsi yang merepresentasikan wilayah cepat tumbuh. Kemudian terdapat sembilan provinsi yang merepresentasikan wilayah dengan perekonomian maju tapi tertekan atau wilayah yang berkembang cepat meskipun pendapatan/kapitanya relatif rendah. Tingginya laju urbanisasi pada beberapa provinsi di Indonesia mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi yang sekarang menjadi pusat konsentrasi penduduk akan terus mengalami peningkatan di masa depan. Selain itu, beberapa provinsi yang tadinya *less populated* akan menjadi pusat-pusat baru konsentrasi penduduk sebagai bentuk limpahan dari provinsi yang telah terpenuhi daya tampungnya. Zhang (2016) dan Awasthi (2021) menjelaskan bahwa pada masa awal urbanisasi umumnya ditandai dengan percepatan laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang kemudian diikuti dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada tingkat lanjut, urbanisasi akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Fenomena urbanisasi di Indonesia masih berada di tahap awal dan berpotensi mencapai tingkat lanjut pada 5 hingga 15 tahun ke depan. Pada rentang tahun 2025 hingga 2030, Indonesia akan mencapai puncak dari bonus demografi. Implikasinya, semakin banyak jumlah penduduk usia produktif maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang datang perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan.

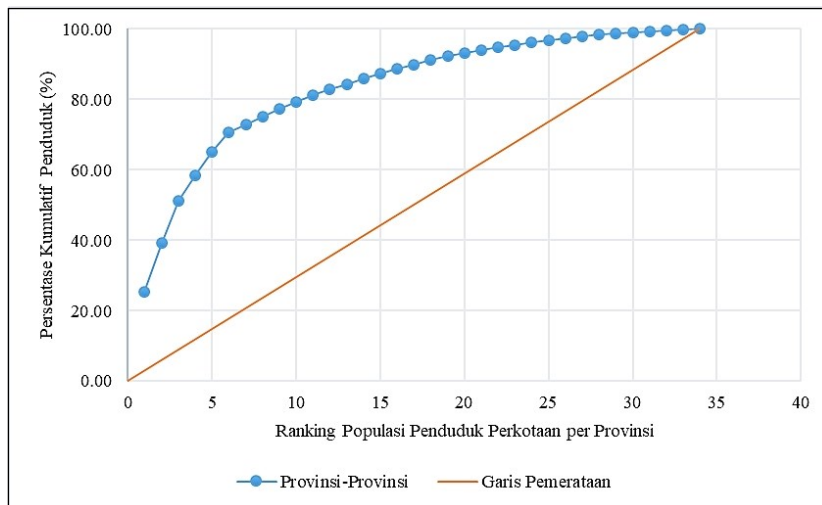
Urbanisasi di negara berkembang seperti Indonesia umumnya akan memicu transformasi spasial yang kompleks. Tingginya laju urbanisasi di suatu wilayah akan mendorong terjadinya transformasi perdesaan menjadi perkotaan, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi wilayahnya. Gambar 3 menunjukkan sebaran kelompok wilayah yang berbeda antara KBI dan KTI. KBI didominasi oleh dua kelompok wilayah yaitu wilayah dengan laju urbanisasi tinggi dan laju PDRB/kapita sedang, serta wilayah dengan laju urbanisasi sedang dan PDRB/kapita tinggi. KTI didominasi oleh kelompok wilayah dengan laju urbanisasi tinggi dan laju PDRB/kapita tinggi, serta kelompok wilayah dengan laju urbanisasi rendah dan laju PDRB/kapita tinggi. Fenomena laju urbanisasi yang rendah di KTI disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan penduduk perkotaan serta besarnya luasan perdesaan. Sebaliknya, apabila laju urbanisasi KBI mengalami penurunan, umumnya lebih disebabkan karena urbanisasi telah mencapai tahap lanjut. Peningkatan urbanisasi dan PDRB/kapita yang dialami provinsi-provinsi di KTI akan mendorong perkembangan kota-kota kecil dan menengah serta memperkecil ketimpangan pembangunan di Indonesia. Reklasifikasi perdesaan menjadi perkotaan di KTI juga akan meningkat meskipun tidak menyamai intensitas reklasifikasi perdesaan di KBI.



Gambar 3. Peta Regionalisasi Wilayah Laju Urbanisasi dan Laju PDRB per Kapita Tahun 2018

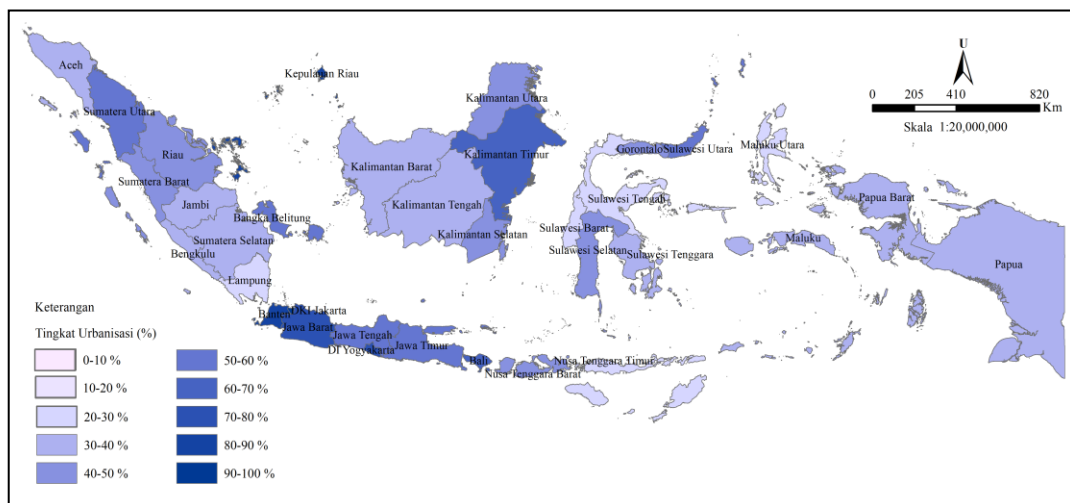
Karakteristik Urbanisasi di Indonesia

Indeks Primasi dari populasi penduduk perkotaan provinsi-provinsi di Indonesia adalah 0,7 dengan nilai *Zipf's Rank Size Distribution* sebesar 1,37. Semakin besar nilai Indeks Primasi (mendekati 1) dan *Zipf's Rank Size Distribution* ($q > 1$) mengindikasikan semakin kuat peranan dan tingkat keutamaan kota besar terhadap kota dengan jenjang di bawahnya. Sebaran penduduk perkotaan akan membentuk suatu kota *primate*/utama. Berdasarkan Gambar 4, Kurva Lorenz penduduk perkotaan di Indonesia membentuk kurva cembung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia terkonsentrasi berat pada wilayah-wilayah tertentu. Sepuluh provinsi dengan populasi penduduk perkotaan terbesar pada tahun 2018 yaitu Jawa Barat (25,44%), Jawa Timur (13,87%), Jawa Tengah (11,96%), DKI Jakarta (7,06%), Banten (6,81%), Sumatera Utara (5,40%), Sulawesi Selatan (2,47%), Sumatera Selatan (2,16%), Bali (2,15%), dan D.I. Yogyakarta (1,91%). Persentase kumulatif penduduk perkotaan dari kesepuluh provinsi tersebut mencapai 80%, sedangkan sebanyak 20% penduduk perkotaan Indonesia tersebar di 24 provinsi lainnya dengan proporsi masing-masing sekitar 0-2%.



Gambar 4. Kurva Lorenz Penduduk Perkotaan di Indonesia Tahun 2018

Provinsi-provinsi yang mengalami pemusatan penduduk perkotaan umumnya merupakan daerah tujuan yang menarik bagi para penduduk migran. Populasi penduduk perkotaan Indonesia terkonsentrasi pada provinsi-provinsi dengan tingkat urbanisasi 50-60% dan 70-80% hingga mencapai angka 88.681.032 jiwa. Provinsi-provinsi di KBI pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dibandingkan KTI. Gambar 5 menunjukkan bahwa KBI menjadi daerah pemusatan penduduk perkotaan, khususnya pada Pulau Jawa yang setiap provinsinya memiliki tingkat urbanisasi di atas 50%. Perbedaan tingkat urbanisasi antara KBI dan KTI mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan. Provinsi yang didominasi kawasan perkotaan umumnya lebih maju dibandingkan provinsi yang didominasi kawasan perdesaan.

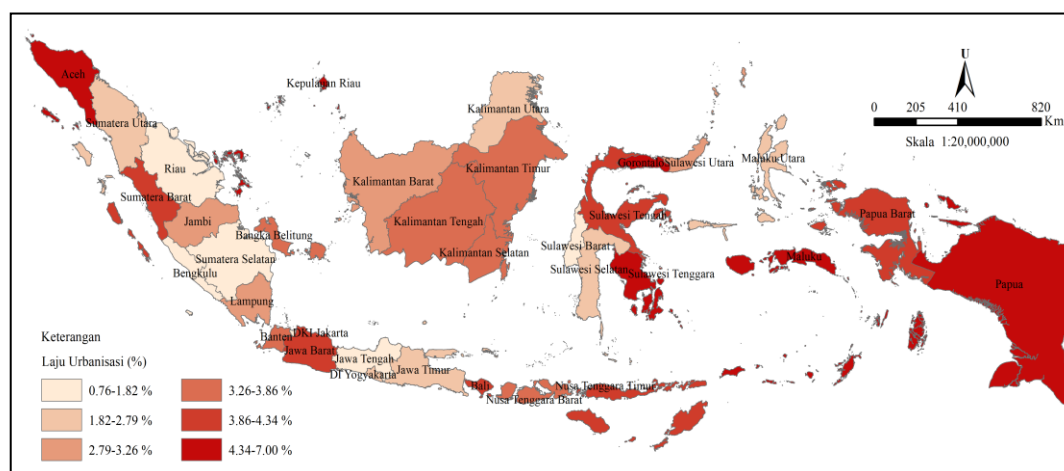


Gambar 5. Peta Tingkat Urbanisasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018

Pada lingkup regional, provinsi-provinsi dengan laju urbanisasi 3,86-4,34% memiliki angka kumulatif penduduk perkotaan hingga 30,78% dari total penduduk perkotaan atau

sebesar 45.502.286 jiwa. Provinsi dengan laju urbanisasi sebesar 3,86-4,34% di antaranya yaitu Jawa Barat, Papua Barat, Bali, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Populasi penduduk perkotaan paling kecil terdapat pada wilayah dengan laju urbanisasi 4,34-7% yaitu sebesar 6.681.893 jiwa atau sekitar 4,52% dari total penduduk perkotaan Indonesia. Provinsi dengan laju urbanisasi sebesar 4,34-7% yaitu Maluku, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, dan Aceh.

Tingginya populasi penduduk perkotaan di daerah-daerah tertentu seperti Pulau Jawa dan Pulau Bali mengindikasikan telah terjadi aliran perpindahan penduduk menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Apabila proses pemusatan penduduk ini terus dibiarkan maka daya tampung wilayah akan mencapai titik jenuh. Pada kasus kota-kota besar seperti kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), meskipun daya tampung perkotaan telah mencapai titik jenuh, namun tidak lantas menyurutkan pergerakan penduduk untuk datang ke daerah tersebut. Populasi penduduk perkotaan di kawasan Jabodetabek telah mencapai lebih dari 20% dari total penduduk perkotaan Indonesia. Jumlah penduduk yang melampaui kapasitas daya tampung wilayah dapat berdampak negatif bagi wilayah konsentrasi itu sendiri maupun wilayah yang ditinggalkan. Pesatnya proses urbanisasi akibat pemusatan penduduk di perkotaan, secara fisik ditandai dengan hal-hal berikut: 1) meluasnya perkotaan ke wilayah sekitarnya sehingga membentuk kawasan metropolitan ataupun megapolitan; 2) meluasnya perkembangan fisik perkotaan ke kawasan *suburban* dan perdesaan sehingga jumlah desa-kota meningkat; 3) terjadinya reklasifikasi kawasan perdesaan menjadi perkotaan terutama di Pulau Jawa; 4) kecenderungan penurunan pertumbuhan penduduk di kota inti metropolitan, sebaliknya terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di daerah sekitarnya; dan 5) meningkatnya alih fungsi lahan di kawasan perdesaan yang mengalami proses pengkotaan (Malamassam, 2016).



Gambar 6. Peta Laju Urbanisasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018

Secara spasial provinsi-provinsi di KTI memiliki laju urbanisasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di KBI. Apabila fenomena ini terus terjadi maka provinsi-provinsi di KTI akan mengalami peningkatan penduduk perkotaan secara signifikan dalam waktu dekat. Laju urbanisasi yang relatif tinggi di KTI juga mengindikasikan adanya perubahan arus perpindahan penduduk ke luar Pulau Jawa (Gambar 6). Menurut Firman (2017), fenomena urbanisasi di Indonesia memiliki beberapa ciri khas di antaranya yaitu: (1) fenomena urbanisasi *in-situ* atau *rural urbanization* berlangsung sangat cepat, ditunjukkan dari banyaknya reklasifikasi perdesaan menjadi perkotaan di Pulau Jawa; (2) struktur

pekerjaan di pusat-pusat kota didominasi oleh sektor jasa sedangkan daerah pinggiran di sekitarnya didominasi oleh sektor manufaktur dan industri; dan (3) kota menengah dan kota kecil Indonesia mengalami pertumbuhan yang lambat. Berbeda dengan fenomena urbanisasi pada umumnya yang didorong oleh migrasi desa-kota, urbanisasi *in-situ* merupakan fenomena ketika suatu permukiman perdesaan dan populasi di dalamnya berubah menjadi permukiman perkotaan ataupun *semi-urban* tanpa melibatkan banyak perpindahan penduduk secara geografis (Zhu, 2017). Urbanisasi *in-situ* dianggap sebagai salah satu alternatif yang mampu mengimbangi ketimpangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.

Pengaruh Urbanisasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Nilai probabilitas atau *Sig.* hasil pengujian regresi linear secara keseluruhan memiliki nilai di bawah 0,05. Artinya H_0 ditolak dan terdapat korelasi yang signifikan antarvariabel. Dari ketiga model regresi linear, nilai *R Square* yang relatif besar terdapat pada hubungan variabel persentase penduduk perkotaan dan variabel persentase penduduk miskin perdesaan. Pada tahun 2000, variabel persentase penduduk perkotaan berpengaruh sebesar 29,4% terhadap perubahan variabel persentase penduduk miskin perdesaan, kemudian meningkat menjadi 52,3% pada tahun 2018. Sebaliknya, pengaruh variabel persentase penduduk perkotaan terhadap variabel persentase penduduk miskin perkotaan cenderung lebih kecil yaitu dengan kisaran nilai *R Square* terendah 14,7% dan nilai *R Square* tertinggi 15,5%. Pengaruh variabel persentase penduduk perkotaan terhadap variabel PDRB/kapita menunjukkan penurunan dari 41,8% di tahun 2000 menjadi 15,8% di tahun 2015. Artinya, pengaruh persentase penduduk perkotaan terhadap peningkatan PDRB/kapita semakin kecil setiap tahunnya.

Tabel 3. Nilai Koefisien Regresi Linear Sederhana

	Nilai Koefisien									
	Tingkat Urbanisasi									
	2000		2005		2010		2015		2018	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
PDRB/ Kap	-0,218	0,877	-0,115	0,798	0,462	0,509	0,471	0,496	0,488	0,466
Penduduk Miskin Perkotaan	0,834	0,464	0,929	0,249	0,647	0,436	0,998	0,329	0,724	0,447
Penduduk Miskin Perdesaan	2,033	-0,527	2,218	-0,627	2,129	-0,536	2,193	-0,576	2,336	-0,705

Keterangan: a (konstanta regresi); b (koefisien regresi)

Perpindahan penduduk dari daerah yang kurang maju menuju daerah yang lebih maju atau dalam konteks urbanisasi dikatakan sebagai perpindahan menuju perkotaan, pada faktanya telah berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hubungan positif antara variabel persentase penduduk perkotaan dan variabel PDRB/kapita hasil analisis regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase penduduk perkotaan suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula pendapatan per kapita penduduknya. Pada tahun 2018, peningkatan variabel persentase penduduk perkotaan sebesar satu unit akan mengakibatkan peningkatan rata-rata variabel PDRB/kapita sebesar 0,466 (Tabel 3). Hubungan ini mampu menjelaskan mengapa daerah-daerah dengan tingkat

urbanisasi yang tinggi cenderung memiliki kondisi perekonomian yang baik pula. Temuan ini mengonfirmasi studi terdahulu yang pernah dilakukan oleh Hassan & Pitoyo (2017). Menurut Hassan & Pitoyo (2017), peningkatan pendapatan per kapita yang disebabkan oleh urbanisasi akan memengaruhi tingkat pembangunan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, perbedaan perkembangan tingkat urbanisasi antarprovinsi maupun antara perdesaan dan perkotaan akan membentuk ketimpangan pendapatan per kapita (Chauvin et al., 2017). Lebih lanjut perbedaan pendapatan antara perdesaan dan perkotaan umumnya menjadi faktor utama penyebab penduduk perdesaan melakukan mobilitas ke perkotaan (Sengupta, 2013). Pembangunan ekonomi yang lebih maju di perkotaan akan memberikan kesempatan bagi para pendatang untuk keluar dari kemiskinan.

Menurut Fields (1981), kemampuan perkotaan untuk menyejahterakan para pendatangnya disebut sebagai dampak perluasan atau *fields enlargement effect*. Secara tidak langsung, urbanisasi juga dapat menyejahterakan kehidupan di perdesaan melalui upah kerja atau *remittance* dan pengurangan persaingan pasar kerja di perdesaan. Cobbinah et al. (2015) menegaskan bahwa urbanisasi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam penurunan kemiskinan di perdesaan. Sebagaimana hasil analisis regresi linear, didapati bahwa variabel persentase penduduk perkotaan memiliki hubungan berbanding terbalik atau negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin perdesaan. Pada tahun 2000, setiap kali variabel persentase penduduk perkotaan bertambah 1 maka rata-rata variabel jumlah penduduk miskin perdesaan akan berkurang 0,527. Kemudian pengurangan rata-rata variabel jumlah penduduk miskin perdesaan menjadi semakin signifikan pada tahun 2018 hingga mencapai angka 0,705 (Tabel 3). Dampak penurunan penduduk miskin perdesaan oleh urbanisasi terjadi secara konsisten selama 18 tahun dan semakin kuat hubungannya dari tahun ke tahun. Sedikit berbeda dengan hasil penelitian Youssef et al. (2016) yang memiliki daerah kajian negara Vietnam. Menurut Youssef et al. (2016), urbanisasi lebih berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pertanian. Namun ketika ditinjau dari penurunan populasi penduduk miskin perdesaan, pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita akibat urbanisasi belum tentu diikuti dengan penurunan populasi penduduk miskin.

Terdapat beberapa skenario bagaimana urbanisasi mampu menurunkan kemiskinan perdesaan melalui peningkatan pendapatan dan pengeluaran pada rumah tangga perdesaan (Jedwab et al., 2017; Mallick, 2014; Roberts et al., 2019). Pertama, proses urbanisasi akan melibatkan migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan. Penduduk perdesaan bermigrasi ke perkotaan dengan harapan mampu keluar dari kemiskinan yang menjerat keluarganya (Zhang, 2016). Banyaknya kesempatan kerja di perkotaan memungkinkan para migran mendapatkan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih besar dibandingkan upah kerja perdesaan. Umumnya para migran mengalami alih pekerjaan dari sektor pertanian di kawasan perdesaan menjadi sektor industri di kawasan perkotaan. Transformasi sektoral ini mampu menciptakan peluang ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Harris & Todaro, 1970; Jedwab et al., 2017). Noverina (2010) dan Sengupta (2013) menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh migran di perkotaan, meskipun pekerjaan tersebut tergolong kasar dan rendah secara sosial tetap dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan di perdesaan. Terutama jika dibandingkan dengan petani buruh yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sempit. Migrasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran baik untuk penduduk migran di perkotaan maupun penduduk di perdesaan melalui pengiriman upah kerja (Chauvin et al., 2017). Pengiriman upah kerja dapat digunakan untuk berinvestasi pada modal manusia misalnya melalui pendidikan, selain itu dapat pula digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memulai kegiatan nonpertanian.

Skenario kedua dijelaskan oleh Khan et al. (2016), yaitu bahwa urbanisasi dapat meningkatkan pendapatan nonpertanian penduduk perdesaan utamanya yang tinggal di dekat pinggiran kota. Asumsinya industri-industri yang teraglomerasi di perkotaan akan menarik tenaga kerja dari perkotaan maupun perdesaan dengan penawaran upah kerja yang lebih tinggi. Youssef et al. (2016) juga menambahkan bahwa rumah tangga perdesaan yang terletak pada provinsi dengan proporsi penduduk perkotaan lebih tinggi dibanding proporsi penduduk perdesaan cenderung memiliki pengeluaran konsumsi yang lebih tinggi pula. Hal ini terjadi pada rumah tangga perdesaan dikarenakan beberapa hal yaitu: (1) peningkatan pendapatan sebab upah kerja yang lebih tinggi pada provinsi yang didominasi perkotaan; (2) perubahan gaya hidup rumah tangga perdesaan menjadi lebih konsumtif; dan (3) rata-rata harga kebutuhan yang lebih tinggi pada kawasan perkotaan.

Skenario ketiga, *spillover effect* dari urbanisasi akan berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup penduduk miskin perdesaan sehingga mampu keluar dari status miskinnya. Pembangunan perkotaan yang terjadi karena proses urbanisasi dapat berdampak positif bagi penduduk perdesaan. Peningkatan permintaan produksi perdesaan akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Interaksi yang terbentuk dari kerja sama perkotaan dan perdesaan akan memudahkan transfer informasi dan pengetahuan utamanya terkait industrialisasi kegiatan pertanian yang dapat mendorong pembangunan perdesaan (Debski, 2018). Perkotaan juga memiliki peranan penting dalam menawarkan kesempatan pendidikan maupun kesehatan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja perdesaan secara tidak langsung. Di sisi lain urbanisasi juga memiliki dampak negatif bagi pembangunan perdesaan. Debski (2018) menjelaskan bahwa kiriman atau *remittance* dari migran yang bekerja di perkotaan dapat menyebabkan ketergantungan pada rumah tangga perdesaan. Implikasinya partisipasi kerja penduduk perdesaan akan menurun. Lebih lanjut apabila migran tidak dapat mengirimkan uang ke keluarganya di perdesaan maka akan terjadi penurunan pendapatan rumah tangga perdesaan hingga berakhir pada masalah kemiskinan. Dampak jangka panjang dari urbanisasi yaitu terjadinya *brain draining* dan *under ruralization* ketika jumlah penduduk perdesaan terlalu kecil untuk memaksimalkan proses produksi. Fenomena *brain draining* dan *under ruralization* akan menghambat pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah di Indonesia sehingga banyak daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Meski begitu dampak negatif urbanisasi di perkotaan umumnya lebih mengancam kehidupan penduduknya dibandingkan dengan apa yang terjadi di perdesaan.

Hasil analisis regresi linear antara variabel persentase penduduk perkotaan dan variabel jumlah penduduk miskin perkotaan menunjukkan bahwa keduanya berhubungan positif meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2018, setiap kali variabel persentase penduduk perkotaan bertambah 1 unit maka rata-rata variabel jumlah penduduk miskin perkotaan akan bertambah 0,447. Dampak peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan paling rendah terjadi pada tahun 2005 yaitu hanya sebesar 0,249 (Tabel 3). Rendahnya dampak peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan oleh urbanisasi disebabkan adanya peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan di tahun 2005. Peningkatan pendapatan per kapita mampu melepaskan seseorang dari status miskinnya meskipun masih tergolong sebagai penduduk rentan miskin (Ramachandran, 2014).

Konteks penurunan kemiskinan dipandang dari dua sisi yaitu dengan meningkatnya nilai pendapatan per kapita dan dengan menurunnya angka penduduk miskin baik perdesaan maupun perkotaan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan tingkat efektivitas urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya faktor heterogenitas wilayah yang berarti berbeda pula potensi dan permasalahan pada setiap wilayah. Pengaruh urbanisasi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin perkotaan di Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Sebagaimana hasil penelitian oleh Adams & Page (2005), Turok & Mc Granahan

(2013), Fosu (2017), dan Chen et al. (2019) yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang di Afrika dan Asia dengan tingkat perekonomian menengah hingga rendah, umumnya lebih banyak mendapat dampak negatif dibandingkan dampak positif urbanisasi. Salah satu dari dampak negatif akibat urbanisasi ialah peningkatan kemiskinan di perkotaan. Meskipun begitu, pada faktanya tetap terjadi penurunan kemiskinan secara agregat wilayah, namun perkembangannya tidak begitu signifikan. Sebaliknya, negara-negara di Amerika dan Eropa dengan tingkat perekonomian relatif tinggi lebih mampu menurunkan kemiskinan dari kegiatan urbanisasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif urbanisasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita secara agregat wilayah di Indonesia selama periode tahun 2000-2018. Hal ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh Fosu (2017), Hassan & Pitoyo (2017), Solarin (2017), Chen et al. (2019), dan Jayanthakumaran et al. (2020). Namun ketika ditinjau pada level kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Indonesia, pengaruh penurunan kemiskinan oleh urbanisasi cenderung lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa proses urbanisasi di negara berkembang seperti Indonesia merupakan gambaran proses demografi dibandingkan proses ekonomi. Hasil penelitian ini mampu memperjelas studi-studi terdahulu yang telah dilakukan oleh Adams & Page (2005), Acosta et al. (2007), dan Youssef et al. (2016), bahwa urbanisasi mendorong terjadinya ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan. Secara tidak langsung, penduduk migran yang berpindah dari perdesaan ke perkotaan telah menurunkan jumlah penduduk miskin perdesaan melalui remitansi dan peningkatan kualitas hidup. Sebaliknya, perkotaan justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang berasal dari perdesaan. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa kajian terkait urbanisasi dan kemiskinan seharusnya tidak lagi hanya dipahami sebagai fenomena perkotaan dan bersifat satu dimensi. Banyak variabel antara yang sebenarnya berperan besar dalam menghubungkan urbanisasi dan kemiskinan seperti variabel perpindahan penduduk dan remitansi. Pengembangan kajian-kajian tentang pengaruh urbanisasi terhadap kemiskinan di masa depan, dapat lebih mempertimbangkan sifat “multidimensional” yang dimiliki kedua fenomena tersebut.

Terdapat beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam upaya optimalisasi potensi urbanisasi dan perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya “*No Poverty*”. Pertama, perbedaan tingkat urbanisasi di Indonesia disebabkan adanya ketimpangan pembangunan yang dibentuk oleh kebijakan-kebijakan bias kota. Oleh sebab itu, pemerintah harus berfokus pada kebijakan-kebijakan yang mengutamakan integrasi perdesaan dan perkotaan. Kedua, pemerataan fasilitas pelayanan dasar menjadi penting agar perpindahan penduduk bukan lagi disebabkan kurangnya fasilitas pelayanan di perdesaan melainkan karena peluang untuk berkembang yang ditawarkan perkotaan. Ketiga, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui investasi sarana-prasarana transportasi untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia (World Bank, 2019). Keempat, menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Kelima, kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor. Upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin belum tentu mampu menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

Daftar Pustaka

- Acosta, P., Fajnzylber, P., & Lopez, J. H. H. (2007). The impact of remittances on poverty and human capital: Evidence from Latin American household surveys. In *World Bank Policy Research Working Paper* (No. 4247). Washington DC. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7392>.
- Adams, R. H., & Page, J. (2005). Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, *33*(10), 1645–1669. doi:10.1016/j.worlddev.2005.05.004.
- Awasthi, S. (2021). ‘Hyper’-Urbanisation and migration: A security threat. *Cities*, *108*. doi:10.1016/j.cities.2020.102965.
- Badan Pusat Statistik. (1997). *Penduduk Indonesia: Hasil sensus penduduk 1990*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Penduduk Indonesia: Hasil survei penduduk antar sensus 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Penduduk Indonesia: Hasil survei penduduk antar sensus 2015*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Brühlhart, M., & Sbergami, F. (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. *Journal of Urban Economics*, *65*(1), 48–63. doi:10.1016/j.jue.2008.08.003.
- Chauvin, J. P., Glaeser, E., Ma, Y., & Tobio, K. (2017). What is different about urbanization in rich and poor countries? Cities in Brazil, China, India and the United States. *Journal of Urban Economics*, *98*, 17–49. doi:10.1016/j.jue.2016.05.003.
- Chen, M., Sui, Y., Liu, W., Liu, H., & Huang, Y. (2019). Urbanization patterns and poverty reduction: A new perspective to explore the countries along the Belt and Road. *Habitat International*, *84*, 1–14. doi:10.1016/j.habitatint.2018.12.001.
- Cobbinah, P. B., Erdiaw-Kwasie, M. O., & Amoateng, P. (2015). Rethinking sustainable development within the framework of poverty and urbanisation in developing countries. *Environmental Development*, *13*, 18–32. doi:10.1016/j.envdev.2014.11.001.
- Debski, J. (2018). *Do remittances increase agricultural productivity? the case of Ghana*. Lund University.
- Fields, G. S. (1981). Poverty, inequality, and development: A distributional approach. *Journal of Policy Modeling*, *3*(3), 295–315. doi:10.1016/0161-8938(81)90013-2.
- Firman, T. (2017). The urbanisation of Java, 2000–2010: towards ‘the island of mega-urban regions.’ *Asian Population Studies*, *13*(1), 50–66. doi:10.1080/17441730.2016.1247587.
- Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *Research in Economics*, *71*(2), 306–336. doi:10.1016/j.rie.2016.05.005.
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *The American Economic Review*, *60*(1), 126–142.
- Hassan, M. E. E., & Pitoyo, A. J. (2017). Urbanization and economic development in Indonesia: Demographic perspectives analysis. *Populasi*, *25*(2), 54–69.
- Henderson, V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. *Journal of Economic Growth*, *8*, 47–71. doi:10.1023/A:1022860800744.
- Jayanthakumaran, K., Verma, R., Wilson, E. J., & Wan, G. (2020). Correction to: Internal migration, urbanization, and poverty in Asia: Dynamics and interrelationships. In K. Jayanthakumaran, R. Verma, G. Wan, & E. Wilson (Eds.), *Internal migration, urbanization and poverty in Asia: Dynamics and interrelationships* (pp. C1–C1). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-13-1537-4_13.
- Jedwab, R., Christiaensen, L., & Gindelsky, M. (2017). Demography, urbanization and development: Rural push, urban pull and ... urban push? *Journal of Urban Economics*, *98*, 6–16. doi:10.1016/j.jue.2015.09.002.
- Khan, A. U., Saboor, A., Ali, I., Malik, W. S., & Mahmood, K. (2016). Urbanization of multidimensional poverty: empirical evidences from Pakistan. *Quality & Quantity*, *50*, 439–469. doi:10.1007/s11135-014-0157-x.
- Liu, Y., Li, Z., & Jin, J. (2014). Pseudo-urbanization or real urbanization? urban China’s mergence of administrative regions and its effects: A case study of Zhongshan City, Guangdong Province. *China Review*, *14*(1), 37–59.
- Malamassam, M. A. (2016). Youth migration in Indonesia: Decision to move and to choose destination areas. *Indonesian Journal of Geography*, *48*(1), 62–72. doi:10.22146/ijg.12469.

- Mallick, S. K. (2014). Disentangling the poverty effects of sectoral output, prices, and policies in India. *Review of Income and Wealth*, 60(4), 773–801. doi:10.1111/roiw.12026.
- Noverina, M. (2010). Fenomena urbanisasi dan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 36(2), 103–124.
- Ramachandran, H. (2014). Urbanisation: A solution to poverty? *Social Change*, 44(4), 593–603. doi:10.1177/0049085714548544.
- Roberts, M., Sander, F. G., & Tiwari, S. (2019). *Time to act: Realizing Indonesia's urban potential*. Washington DC: World Bank. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31304>.
- Sengupta, A. (2013). Migration, poverty and vulnerability in the informal labour market in India. *The Bangladesh Development Studies*, 36(4), 99–116.
- Solarin, S. A. (2017). The role of urbanisation in the economic development process: Evidence from Nigeria. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 11(3), 223–255. doi:10.1177/0973801017703512.
- Turok, I., & Mc Granahan, G. (2013). Urbanization and economic growth: the arguments and evidence for Africa and Asia. *Environment and Urbanization*, 25(2), 465–482. doi:10.1177/0956247813490908.
- UN Habitat. (2016). *Urbanization and development: emerging futures*. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2018). *Urbanization for all* (Indonesia). World Bank. Retrieved from World Bank website: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-september-2018>.
- World Bank. (2019). Aspiring Indonesia—expanding the middle class. In *Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class*. Washington DC. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33237>.
- Youssef, A. Ben, Arouri, M. E. H., & Nguyen-Viet, C. (2016). Does urbanization reduce rural poverty? Evidence from Vietnam. *Economic Modelling*, 60, 1–46.
- Zhang, X. Q. (2016). The trends, promises and challenges of urbanisation in the world. *Habitat International*, 54(3), 241–252. doi:10.1016/j.habitatint.2015.11.018.
- Zhu, Y. (2017). In situ urbanization in China: Processes, contributing factors, and policy implications. *China Population and Development Studies*, 1, 45–66. doi:10.1007/BF03500917.